

ANDI SUWIRTA
IYEP CANDRA HERMAWAN

Masalah Karakter Bangsa dan Figur Kepemimpinan di Indonesia: Perspektif Sejarah

IKHTISAR: Karakter bangsa bagi negara-negara kebangsaan adalah hasil dari proses pencarian dan penemuan identitas dan jati diri bangsa tersebut. Karena tiap bangsa di dunia memiliki perjalanan sejarahnya sendiri-sendiri, maka tidaklah mengherankan kalau terjadi perbedaan karakter bangsa. Tulisan ini mengkaji tentang masalah karakter bangsa dan figur kepemimpinan di Indonesia. Dengan menganalisis enam figur Presiden Indonesia, tulisan ini menunjukkan bahwa ada kaitan yang erat antara pembangunan karakter bangsa dengan keteladanan dari seorang pemimpin bangsa. Hal ini karena seorang pemimpin, terutama Presiden Indonesia, adalah figur panutan dan contoh teladan bagi rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2015 nanti. Krisis kepemimpinan dan tiadanya keteladanan dari seorang pemimpin, dalam corak masyarakat Indonesia yang masih paternalistik, jelas akan mengakibatkan juga proses reduksi terhadap karakter bangsa secara keseluruhan.

KATA KUNCI: Karakter bangsa, negara-bangsa Indonesia, figure pemimpin, Presiden Indonesia, dan model kepemimpinan.

ABSTRACT: National character for nation-states is the result of seeking process and the invention of identity and national characteristic. Due to every nation in the world has its history journey, then, it is not a wonder if happened difference of national character. This article discusses about the problem of national character and leadership figure in Indonesia. By analyzing six figures of Indonesian President, this article indicates that there is closely relationship between development of national character and role model of a national leader. This condition because a leader, especially Indonesian President, is peer figure and role model for Indonesian society that amount to more than 250 million people in 2015 later. Leadership crisis and nothing role model from a leader, in Indonesian society pattern that still paternalistic, clearly will result also reduction the process of national character building as a whole.

KEY WORD: National character, Indonesia's nation-state, leadership figure, Indonesia President, and leadership model.

Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat; dan H. Iyep Candra Hermawan, M.Pd. adalah Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNSUR (Universitas Suryakencana) Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Alamat emel: andisuwirta@yahoo.com dan fkipunsurcjr@yahoo.co.id

PENGANTAR

Masalah karakter bangsa (*national character*) bagi negara-negara kebangsaan (*nation-states*) adalah merupakan proses pencarian dan penemuan identitas dan jati diri bangsa tersebut yang membedakan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Karakter bangsa itu lahir dan terbentuk karena proses sejarah bangsa tersebut yang panjang. Karena tiap bangsa di dunia memiliki perjalanan sejarahnya sendiri-sendiri, maka tidaklah mengherankan kalau terjadi perbedaan karakter bangsa. Sesungguhnya, karakter bangsa ini berkenaan juga dengan kebanggaan terhadap bangsa (*pride to nation*) tersebut dalam proses menjadi dan integrasi sebuah negara-bangsa. Sehingga sejarawan Sartono Kartodirdjo (1982) menyatakan bahwa bangsa yang tidak mengenal dan memiliki sejarahnya sama dengan bangsa yang kehilangan identitas, jati diri, dan karakter bangsanya.

Karakter bangsa dibentuk oleh proses perjalanan sejarah bangsa tersebut. Karakter bangsa biasanya terejawantahkan dalam jiwa, semangat, kepribadian, gaya hidup, etos kerja, dan sikap mental bangsa tersebut dalam mersepons berbagai tantangan dan problematika sosial yang dihadapinya (Koentjaraningrat ed., 1984:6-9). Dalam proses sejarahnya, faktor-faktor intern dan ekstern juga turut mewarnai corak karakter bangsa tersebut.

Faktor intern merupakan potensi kolektivitas yang, dalam proses interaksi dan integrasinya, turut membentuk karakter bangsa. Ia juga bisa berupa *local genius* yang mampu merespons dan mengapresiasi budaya-budaya yang ada menjadi ciri khas kreativitas dan karakter bangsa tersebut (Rohaedi, 1984:54). Sementara faktor ekstern berkenaan dengan tantangan dan pengaruh dari dunia luar – apakah budaya, sosial, ekonomi, dan politik – yang juga turut mewarnai arah perjalanan sejarah dan corak karakter suatu bangsa. Gabungan saling pengaruh dan interaksi yang dinamis dari dua faktor inilah yang turut mempengaruhi sejarah suatu bangsa, yang pada gilirannya juga membentuk karakter bangsa tersebut berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

PENGALAMAN NEGARA LAIN DALAM PEMBINAAN KARAKTER BANGSA

Ada baiknya juga melihat pengalaman negara-negara lain, yang sudah maju, dalam proses pencarian dan pembinaan karakter bangsa. Dalam hal ini, kami ingin mengambil contoh negara Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang

menjadi negara “super power” pada abad ke-20 hingga sekarang; walaupun pada tahun 1990-an, negara Uni Sovyet akhirnya hancur berantakan dan digantikan posisinya oleh negara Rusia sekarang. Melihat sejarah dua negara tersebut sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam konteks untuk membandingkan dan mengambil pelajaran dari pengalaman negara lain, terutama dalam kaitannya dengan masalah pembangunan identitas dan karakter bangsa, serta masalah kepemimpinan dalam sebuah negara-bangsa.

Akan halnya dengan bangsa, dalam pengertian *nation-state*, Amerika Serikat dan Rusia, jelas berbeda karakternya karena memang memiliki sejarah perjalanan bangsa yang berlainan. Di samping juga karena potensi kolektivitas bangsa tersebut dan tantangan-tantangan yang dihadapinya berbeda. Betapapun kedua bangsa tersebut, dalam perspektif sejarah modern mereka masing-masing, mengklaim sebagai kampium demokrasi (Amerika Serikat sebagai demokrasi liberal dan Uni Sovyet sebagai demokrasi rakyat), tetapi makna “demokrasi” dan implementasinya di kedua negara tersebut berbeda sekali, sesuai dengan persepsi dan pengalaman sejarah bangsa itu masing-masing.

Sebuah *joke* politik cukuplah menggambarkan tentang pengalaman berdemokrasi yang bersifat diametral di kedua negara tersebut pada tahun 1980-an. Dikatakan bahwa ketika Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Leonid Breznev dari Uni Sovyet, mereka saling membanggakan diri sebagai pembela demokrasi. “*Saya tidak akan marah*”, kata Ronald Reagan, “*jika ada rakyat Amerika yang berdemonstrasi di depan Gedung Putih dengan meneriakkan kata-kata ‘Reagen Bodoh’, karena ini adalah negeri demokrasi*”. Maka dengan tenang namun sinis, Leonid Breznev menjawab, “*Saya juga tidak marah, bahkan akan diberi hadiah, apabila ada rakyat Rusia yang berdemonstrasi di Kremlin dengan mengatakan ‘Reagen Bodoh’, persis seperti yang dilakukan di depan Gedung Putih itu*” (Suwirta, 1989). Dalam hal ini jelas, Ronald Reagan memaknai demokrasi sebagai kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan sikapnya kepada siapapun. Sedangkan Leonid Breznev memaknai demokrasi sebagai kebebasan rakyat untuk mengecam musuh-musuh politiknya.

Di sini perlu dipahami tentang sejarah terbentuknya bangsa Amerika Serikat. Negeri ini, suatu *nation-state* yang lahir pada abad ke-18, dapat dikatakan bahwa proses pembentukannya merupakan hasil kesepakatan sosial (*the social contract*) antara wilayah-wilayah independen yang ada di Amerika Utara. Kesepakatan sosial itu didasari oleh suatu kenyataan bahwa mereka jelas tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa saling bekerjasama di

satu sisi, dan di sisi lain karena mereka menentang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak kolonialis Inggris atas wilayah yang telah mereka klaim sebagai “tanah yang menjanjikan dan penuh kebebasan” itu (Godechot, 1989:14-18). Yang terakhir ini nampak dari semboyan yang dicanangkan oleh tokoh-tokoh generasi pertama dan bapak-bapak pendiri (*the founding fathers*) dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa “di mana ada kebebasan maka di situlah negeriku”. Hal-hal seperti itulah yang menjadikan deklarasi independen-nya Amerika Serikat sangat menekankan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia seperti: hak hidup, kebebasan, hak milik, kesejahteraan, kebahagiaan, dan rasa aman sebagai hak pemberian Tuhan yang tidak boleh dinegasikan oleh siapapun, termasuk oleh negara itu sendiri (Schapiro, 1958:93).

Sementara itu, sejarah Uni Sovyet jelas berbeda dengan Amerika Serikat. Negara ini merupakan kelanjutan dari kekaisaran Rusia dengan tradisi agama Kristen Ortodoks yang kuat. Pada seperempat awal abad ke-20, negara ini dilanda revolusi oleh golongan komunis Bolseviik di bawah pimpinan Vladimir Lenin. Kekaisaran dihancurkan dan pemerintahan baru pimpinan Partai Komunis Uni Sovyet ditegakkan. Tapi pemerintahan baru ini jelas tidak bisa mengubah struktur dan kultur politik yang sudah mapan. Corak pemerintahan yang sentralistis dan elitis warisan politik kekaisaran Rusia, dalam banyak hal, dilanjutkan oleh para penguasa Sovyet-Rusia. Kehidupan demokrasi politik dalam artian yang sesungguhnya, jelas tidak dilaksanakan dengan baik. Pemerintahan yang otoriter, partai politik yang tunggal, pers yang dikontrol ketat, oposisi yang direpresi, dan parlemen yang mandul mewarnai kehidupan negara Uni Sovyet (Sargent, 1986:66-65). Karena itu ketika Michael Gorbachev, Presiden Uni Sovyet pada akhir tahun 1980-an, mewacanakan program *Glansnot* (keterbukaan) dan *Perestroika* (penataan kelembagaan), maka negara yang tidak terbiasa dengan kehidupan demokrasi itu mengalami disintegrasi politik dan kebangkrutan sosial.

Dalam memandang keruntuhan negara Uni Sovyet pada akhir abad ke-20 itu, Francis Fukuyama sampai pada kesimpulan bahwa sejarah telah berakhir (*the end of history*). Kata-kata bersayap ini maksudnya adalah bahwa sejarah pergumulan pemikiran, ideologi, dan peradaban umat manusia antara mereka yang meyakini Komunisme dengan Liberalisme telah berakhir, dengan kemenangan berada pada Liberalisme dan Kapitalisme (Fukuyama, 2001). Itulah nampaknya kecenderungan dan arah sejarah peradaban umat manusia ke depan.

KARAKTER BANGSA INDONESIA

Sekarang, bagaimana halnya dengan karakter bangsa Indonesia yang dibentuk oleh perjalanan sejarahnya? Negara kebangsaan Indonesia memang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun sejarah bangsa ini dan proses pembentukannya menjadi *nation-state* mengalami dinamika yang panjang. Sartono Kartodirdjo (1987:xv) menawarkan perspektif dan kerangka teoritis tentang “integrasi” untuk bisa menggambarkan proses pembentukan bangsa Indonesia. Dengan konsep “integrasi” dimaksudkan bahwa keragaman etnis, budaya, agama, individu dan kelompok, serta elite sosial yang ada pada masyarakat Indonesia itu saling berinteraksi dan berkomunikasi yang dalam perkembangan selanjutnya mengalami dinamika (termasuk mobilitas, kompetisi, dan konflik sosial) menuju ke arah integrasi nasional, sebagaimana terwujud pada tahun 1945. Proses pembentukan bangsa Indonesia yang seperti itu jelas mewarnai karakter, jiwa, semangat, identitas, nilai, dan etos sosial masyarakatnya.

Masalahnya adalah apakah karakter bangsa Indonesia itu merupakan kesinambungan dari warisan entitas politik dan budaya kerajaan-kerajaan yang sebelumnya ada di wilayah Nusantara, atau merupakan perwujudan dari *nation-state* yang benar-benar baru? Masalah ini menjadi perdebatan akademik yang menarik dan belum final sampai sekarang.

Sejak Benedict R.O’G. Anderson mengajukan tesisnya tentang *Old State and New Society* pada tahun 1970/1980-an, maka perdebatan tentang “kesinambungan” dan “perubahan” budaya dan politik di Indonesia, sebagai bagian dari karakter bangsa, terus mengemuka. Bagi mereka yang percaya bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan warisan dan kelanjutan dari masa lalunya, terutama gaya pemerintahan kerajaan Majapahit dan Mataram Islam di Jawa, ditengarai dengan hadirnya kembali – paling tidak pada masa pemerintahan Orde Lama-nya Soekarno (1959-1966) dan Orde Baru-nya Soeharto (1966-1998) – sistem dan budaya politik sentralistik dan otoritarian (Benda, 1982:13-21; dan King, 1982:104-116).

Sementara bagi mereka yang yakin bahwa masyarakat Indonesia itu merupakan pengejawantahan dari *nation-state* yang baru, yang membedakannya dari entitas politik yang lama, merupakan produk dari nasionalisme, modernisasi, serta transformasi sosial, budaya, pendidikan, dan teknologi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 (Feith, 1982:22-29; dan Mackie, 1982:117-130). Meminjam slogan kelompok sastrawan Pujangga Baru pada tahun 1930-an, yang dimotori oleh Sutan Takdir Alisjahbana, di satu sisi masa lalu Indonesia itu telah mati semati-matinya; namun di sisi lain, masa sekarang dan masa depan Indonesia adalah sebuah tatanan

masyarakat baru dan modern yang ditandai oleh semangat rasionalisme, individualisme, dan materialisme (Mihardja ed., 1977).

Alih-alih memperdebatkan secara hitam-putih masalah kontinuitas dan perubahan sistem politik dan budaya Indonesia, Denys Lombard (sejarawan *Indonesianist* dari Perancis) menawarkan perspektif dan pendekatan baru dalam memahami sejarah peradaban masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan model eksplanasi geologi, Denys Lombard melihat masyarakat Indonesia itu dibentuk oleh lapisan-lapisan peradaban dari yang terdalam (masa lalu) hingga terluar (masa kini) dengan sifatnya yang dinamis (Lombard, 1996). Dengan begini maka bisa difahami mengapa dalam *performance* masyarakat Indonesia kontemporer nampak perpaduan antara unsur-unsur peradaban Indonesia Purba, Hindu-Buddha, Islam, dan Barat. Kasus pribadi dan karakter individu yang menarik barangkali nampak pada diri Presiden Soekarno dan Soeharto: penampilan bergaya Barat, agama Islam, nama berbau Hindu, dan sikap toleran pada warisan budaya purba di Indonesia (Suwirta, 2003).

Bagaimanapun, baik karakter individu maupun kelompok sosial, termasuk dalam hal ini karakter bangsa, merupakan produk dari dinamika sejarahnya masing-masing. Sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki karakter yang berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia, karena memang proses pembentukan dan sejarah perjalanan bangsa kita ini khas dan berbeda dengan bangsa lain. Karakter bangsa yang khas dan unik itu jelas merupakan identitas, kepribadian, dan potensi bangsa tersebut untuk bisa tumbuh dan berkembang di masa-masa yang akan datang. Namun, karena kita hidup dalam konteks pergaulan internasional dan dunia global, maka identitas, kepribadian, nilai, etos sosial, dan potensi bangsa itu tidak boleh bersifat statis, melainkan harus kreatif, dinamis, dan responsif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan peradaban dunia yang sedang mengalami proses globalisasi dengan segala nilai-nilai budaya yang menyertainya.

Sesungguhnya, sebagaimana sejarah masyarakat Indonesia sudah menunjukkan, bahwa bangsa ini termasuk yang amat terbuka, lentur, fleksibel, dimanis, dan kreatif dalam merespons tantangan dan tuntutan kebudayaan dari luar. Peradaban-peradaban besar di dunia wujud jejak-jejak peninggalannya di Indonesia. Apa yang baru saja terjadi di dunia luar akan segera terasa dampaknya di Indonesia. Modal dasar dari sikap sosial dan budaya yang potensial ini harus terus dipupuk dan dikembangkan agar masyarakat Indonesia dapat maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia.

FIGUR PEMIMPIN BANGSA: STUDI KASUS PARA PRESIDEN DI INDONESIA

Dalam perspektif sosiologis dan antropologis, kepemimpinan dalam masyarakat dibentuk melalui mekanisme dan model *primus inter pares*. Individu atau pribadi yang unggul itu – baik karena kompetensi, garis genealogi, kekayaan, kekuatan dan kesempurnaan lahiriah/batiniah maupun karena usia, pengalaman, pendidikan, status dan otoritas sosial yang dimilikinya – diakui oleh masyarakat pengusungnya sebagai pemimpin utama dan turut mewarnai corak kepemimpinan dan kehidupan masyarakatnya.

Dalam perspektif historiografi konvensional juga dikenal istilah *the great men theory*, dimana peristiwa-peristiwa penting dan perubahan sosial itu dalam banyak hal digerakkan oleh “orang-orang besar” (Sjamsuddin, 2007; dan Suwirta, 2012). Tidak terkecuali dengan historiografi tradisional Indonesia yang bersifat raja sentrisme; atau historiografi kolonial dimana peranan Gubernur Jenderal dan orang-orang penting Belanda lainnya di Indonesia diberi porsi yang dominan dalam eksplanasi sejarahnya (Kartodirdjo, 1982:48-50).

Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, masalah kepemimpinan nasional menjadi isu sentral yang signifikan. Dalam hal ini terutama kedudukan Presiden, karena menurut konstitusi Indonesia yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) 1945, ia memiliki posisi yang kuat dan kekuasaan yang besar. Presiden Indonesia tidak hanya sebagai Kepala Negara, tetapi juga Kepala Pemerintahan dan Panglima Perang Tertinggi dalam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Karenanya ia dapat menyatakan perang dan damai, membuat undang-undang, menyusun RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), memberi grasi dan abolisi, serta mengangkat para pejabat di bawahnya – betapapun semuanya mesti mendapat persetujuan dari Parlemen, dalam hal ini DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

Dalam konteks ini ada baiknya kita melihat dan membandingkan pribadi-pribadi Presiden Indonesia dalam kaitannya dengan corak kehidupan masyarakat yang dipimpinya. Sedapat mungkin juga akan digali nilai-nilai, visi, dan *policy* yang dimilikinya dalam merespons realitas dan problematika sosial pada setiap zamannya. Hal ini penting untuk melihat karakter pribadi dari seorang pemimpin dan teladan apa, terutama kebaikan dan kebijakan, yang bisa diambil oleh masyarakat Indonesia dari para pemimpin bangsanya.

Sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 2012 ini, kita memiliki 6 orang Presiden: Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.¹ Mereka adalah merupakan pribadi-pribadi yang unggul (*primus inter pares*) pada zamannya dan dipilih atau ditetapkan sebagai Presiden melalui mekanisme demokrasi yang khas Indonesia.

Keenam Presiden tersebut – selama dan sesingkat apapun masa jabatan mereka – telah memberikan andil dan mewarnai corak kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia. Dengan cara, karakter, dan kemampuan masing-masing, mereka berusaha untuk menghantarkan masyarakat Indonesia maju, berkembang, dan modern dengan mensinergikan potensi dinamika bangsa dari dalam dengan peluang dan tantangan yang datangnya dari luar. Peran dan kiprah mereka, jelas tercatat dalam sejarah Indonesia modern (Ricklefs, 2001:312-421).

Pertama, tentang Presiden Soekarno. Presiden Indonesia yang pertama ini adalah pribadi yang menarik dan terkenal. Lahir di Blitar, Jawa Timur, pada tanggal 6 Juni 1901. Ketika menjadi Presiden RI (Republik Indonesia) tahun 1945, dengan demikian, usianya 44 tahun. Dan ketika ia jatuh dari kursi kepresidenannya pada tahun 1967, usianya 66 tahun. Soekarno sendiri meninggal dunia dalam usia 69 tahun, yakni pada tanggal 21 Juni 1970.

Melihat garis keturunannya, Soekarno adalah anak seorang *priyayi* baru (ayahnya, guru dari Jawa; dan ibunya, bangsawan dari Bali). Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi ditempuhnya melalui jalur pendidikan Barat yang modern: HIS (*Hollandsche Inland School*) dan HBS (*Hoogere Burgere School*) di Surabaya, serta THS (*Teknieke Hooge School*) di Bandung. Sejak di HBS, dan setelah duduk di THS, ia aktif dalam organisasi pergerakan kebangsaan, dengan ideologi nasionalisme sebagai orientasi politiknya (Legge, 1985). Karakter dan budaya Jawanya yang sinkretis menjadikan Soekarno memiliki kecenderungan untuk menyatukan kekuatan-kekuatan politik yang secara ideologi saling bertentangan: nasionalisme, Islam, dan Marxisme (Adams, 1965).

Sementara itu kemampuan retorika yang luar biasa dan kesenangannya pada wanita, menjadikan Soekarno sebagai pribadi yang warna-warni

¹Dalam sejarah Indonesia modern, sesungguhnya ada juga nama-nama Presiden Indonesia yang lain, misalnya, Mr. Safruddin Prawiranegara, yang menjadi Presiden PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) pada masa revolusi Indonesia, 1948-1950; serta Mr. Assa'at, yang menjadi *Acting* Presiden Indonesia pada awal tahun 1950-an. Namun dalam sejarah resmi (*official history*) di Indonesia, kedua nama tokoh tersebut tidak dimasukkan sebagai Presiden Indonesia.

(Nuryanti *et al.*, 2007). Namun demikian, kharisma pribadinya tetap bersinar terang yang tidak hanya mampu menjadi simbol integrasi bangsa Indonesia, tetapi juga mendorong Soekarno untuk mempersatukan lebih jauh bangsa-bangsa Asia dan Afrika pada tahun 1950/1960-an agar menjadi kekuatan dunia baru (*the new emerging forces*). Pada tahun 1960-an, nampaknya ia gagal mempertahankan dinamika politik NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunis) di Indonesia, serta jatuh karena tekanan militer, mahasiswa, dan negara-negara Barat – terutama Inggris dan Amerika Serikat – yang tidak senang dengan politik luar negeri dari Presiden Soekarno (Hidayat, 2003:125-142).

Bagaimanapun, Soekarno adalah Presiden pertama dan membanggakan rakyat Indonesia. “*Apa artinya menjadi bangsa Indonesia*” dan pentingnya persatuan Indonesia adalah obsesi utama dan tindakan politik penting dari Soekarno. Bersama-sama dengan Mohamad Hatta, sebagai Wakil Presiden (1945-1956), Soekarno telah menjadi proklamator bagi kemerdekaan Indonesia dan menjadi tokoh “dwi-tunggal” dalam kepemimpinan di Indonesia. Program *national and character building*-nya Soekarno pada tahun 1960-an ternyata menjadi relevan dan diaktualisasikan kembali pada masa kini dengan “pendidikan karakter”.

Kedua, tentang Presiden Soeharto. Presiden Indonesia yang kedua ini juga tidak kalah menarik dan hebatnya. Berpenampilan penuh senyum dan dingin, betapapun ia seorang militer, Soeharto dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Juni 1921 (Roeder, 1985:131). Ketika menjadi Penjabat Presiden RI (Republik Indonesia) pada tahun 1967, dengan demikian, usianya 46 tahun. Dan ketika ia *lengser* (turun) dari kursi kepresidenannya pada tahun 1998, usianya 77 tahun. Soeharto meninggal dunia dalam usia 87 tahun, yakni pada tanggal 27 Januari 2008.

Bila dilihat dari asal-usul keturunan, Soeharto sebenarnya masih punya garis kebangsawanan. Terlebih lagi ketika Soeharto menikah dengan Siti Hartinah (keluarga bangsawan dari keraton Mangkunegaran di Solo, Jawa Tengah) pada tahun 1947, maka kedudukan dan status sosialnya makin mantap. Pendidikan yang ditempuh oleh Soeharto banyak dilakukan di bidang militer. Setelah tamat dari HIS (*Hollandsche Inland School*) dan sekolah menengah ekonomi, ia masuk dinas ketentaraan Belanda, KNIL (*Koninklij Nederlands Indische Legers*), dan kemiliteran Jepang, PETA (Pasukan Pembela Tanah Air). Setelah Indonesia merdeka, Soeharto tetap menjadi tentara; dan sambil kursus di bidang ketentaraan, ia pernah menjabat komandan batalion, resimen, dan divisi tentara di Jawa Tengah. Jabatan terakhir dalam ketentaraannya adalah Panglima KOSTRAD (Komando Strategis Angkatan Darat) dan Menpangad (Menteri Panglima

Angkatan Darat), menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang terbunuh dalam peristiwa G-30-S (Gerakan 30 September) tahun 1965 (Anderson & McVey, 1971).

Soeharto jelas bukan tipe seorang pemikir, penulis, dan orator yang hebat sebagaimana Soekarno. Presiden Soeharto – sebagaimana diakui oleh dirinya sendiri – adalah seorang pragmatis, realistik, dan penuh perhitungan berdasarkan pengalamannya yang banyak belajar dari kenyataan sosial (Soeharto, 1989). Ketika pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan ekonomi pada tahun 1970/1980-an, Soeharto banyak belajar dari para pembantunya, yakni menteri-menteri teknokrat dan birokrat dari perguruan tinggi terkenal di Indonesia seperti: UI (Universitas Indonesia), ITB (Institut Teknologi Bandung), IPB (Institut Pertanian Bogor), dan UGM (Universitas Gadjah Mada). Begitu juga pada tahun 1990-an, menjelang akhir kekuasaannya, Soeharto mulai mendekati umat Islam: banyak mendirikan mesjid YABMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila), merestui berdirinya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia), BMI (Bank Muammalat Indonesia), dan menunaikan ibadah haji sekeluarga.

Sebagai orang Jawa, Soeharto sangat menghayati nilai-nilai budaya asalnya. Salah satu filosofi dan nilai budaya Jawa yang dipegang secara teguh dalam kehidupannya adalah “*ojo kagetan, ojo gumunan, lan ojo dumeh*” (jangan mudah terkejut, jangan merasa heran, dan jangan mentang-mentang). Mungkin karena nilai budaya inilah yang menjadikan Soeharto berpenampilan begitu tenang, sederhana, dan murah senyum, bahkan untuk ukuran orang Jawa kebanyakan sekalipun. Dan karena ketenangan dan penuh perhitunganlah yang menjadikan Soeharto selamat dan keluar sebagai pemenang dalam peristiwa-peristiwa politik penting yang pernah dihadapinya seperti: Peristiwa 3 Juli 1946, G-30-S 1965, MALARI (Malapetaka 15 Januari) 1974, Kudeta ala Sawito Kartowibowo tahun 1976, Oposisi mahasiswa tahun 1978, dan Petisi 50 tahun 1980-an (Anderson & McVey, 1971; Titania, 1978; Anderson, 1980; Bresnan, 1993; dan Cahyono, 1998).

Namun pada tahun 1998, ketenangan Soeharto nampaknya mulai goyah dan tindakan-tindakan politiknya tidak efektif. Di usianya yang tua, ia tidak mampu lagi menghadapi tekanan mahasiswa untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Soeharto kemudian memilih *lengser keprabon* – suatu istilah yang hanya cocok untuk para raja di Jawa – setelah melihat kenyataan bahwa para pembantu dan orang-orang terdekatnya, termasuk para cendekiawan Muslim, sebagian elite militer, dan tidak boleh diabaikan tekanan dari Amerika Serikat, menarik dukungan politik

bagi dirinya (Baehaqi ed., 1998). Era Presiden Soeharto dan pemerintahan Orde Baru telah berakhir pada tahun 1998, kemudian digantikan oleh Era Reformasi yang penuh dengan dinamika dan krisis multi dimensi dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Bagaimanapun, Soeharto adalah Presiden Indonesia yang membawa bangsa ini pada kemajuan dan kesejahteraan ekonomi secara signifikan. Modernisasi dan pembangunan ekonomi adalah prestasi pemerintahan Orde Baru dan menjadikan Presiden Soeharto disegani dan dihargai tidak hanya oleh negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia. Untuk pertama kali pada tahun 1985, misalnya, Indonesia mampu mencapai swasembada pangan; dan menjadikan Soeharto layak mendapat penghargaan dari FAO (*Food and Agricultural Organization*); dan gelar sebagai “Bapak Pembangunan” dari masyarakat Indonesia.

Ketiga, tentang Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Presiden Republik Indonesia pada masa transisi awal di Era Reformasi adalah B.J. (Bacharuddin Jusuf) Habibie. Lahir di Pare-pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936 (Roeder & Mahmud, 1980:93). Ketika menjadi Presiden pada tahun 1998, dengan demikian, usia B.J. Habibie adalah 62 tahun. Dan ketika turun dari jabatannya sebagai Presiden pada tahun 1999, usianya 63 tahun.

Melihat dari latar belakang keluarganya, B.J. Habibie termasuk anak dari golongan menengah ke atas (ibu bangsawan Jawa dan ayah bangsawan Bugis). Pendidikan dasar (Sekolah Rakyat dan Sekolah Menengah Pertama) di Sulawesi Selatan, menengah (Sekolah Menengah Atas) di Bandung, dan tinggi (Institut Teknologi Bandung) dilaluinya dengan prestasi akademik yang luar biasa. Minatnya yang besar di bidang sains dan teknologi – khususnya di bidang pesawat terbang – menjadikan B.J. Habibie dipercaya tidak hanya oleh pemerintah Jerman Barat, tetapi juga oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1980-an untuk menjadi pembantu terdekatnya (sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dan kemudian Wakil Presiden).

Banyak para pengamat yang menilai bahwa B.J. Habibie adalah anak emasnya Presiden Soeharto. Sesungguhnya, hubungan dekat antara keluarga B.J. Habibie dengan Soeharto sudah dibangun sejak tahun 1950-an, ketika Soeharto sebagai Komandan Tentara bertugas di Sulawesi Selatan. B.J. Habibie sendiri sering menganggap Soeharto sebagai “bapak dan guru” dalam banyak hal kehidupan. Hal ini menjadikan B.J. Habibie tidak populer ketika ia harus menggantikan pemerintahan Soeharto pada akhir tahun 1990-an yang dinilai sarat dengan praktek KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Winters, 1999). Namun sebagai Presiden RI (Republik Indonesia) yang singkat, B.J. Habibie bukannya tanpa prestasi.

Proses demokratisasi, khususnya di bidang pers dan pelaksanaan PEMILU (Pemilihan Umum) tahun 1999 yang jujur dan adil, jelas terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie.

Sebagai seorang teknolog yang berpikir rasional, lugas, dan realistis, B.J. Habibie juga membuat sejarah baru: menawarkan opsi kepada rakyat Timor Timur untuk tetap bergabung dengan Indonesia atau memilih merdeka. Dalam pandangan B.J. Habibie, masalah Timor Timur itu seperti *pebble in the shoes* (kerikil dalam sepatu) yang tidak nyaman dan mengganggu bagi Indonesia, terutama dalam forum-forum internasional dan citra politik luar negeri yang bebas-aktif. Namun, kebijakan politiknya yang drastik dan berani itu harus dibayar mahal. Ketika Timor Timur memilih opsi merdeka dan lepas dari Indonesia (Nurzaman, Suwirta & Kamsori, 2012), B.J. Habibie menjadi sasaran kritik sosial dari lawan-lawan politiknya dan tidak lagi dipercaya oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

Keempat, tentang Presiden Abdurrahman Wahid. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Presiden RI yang tidak kalah menariknya, yakni Abdurrahman Wahid. Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 7 September 1940 (Barton, 1999:326). Ketika menjadi Presiden RI (Republik Indonesia) pada tahun 1999, dengan demikian, usia Abdurrahman Wahid adalah 59 tahun. Dan ketika tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2001, usianya 61 tahun. Abdurrahman Wahid meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2009, dalam usia 69 tahun.

Jika dilihat dari latar belakang keluarganya, Abdurrahman Wahid – yang biasa dipanggil “Gus Dur” – adalah bukan orang sembarangan. Kakeknya, Kyai Haji Hasjim Asj’ari, adalah ulama terkenal dan pendiri organisasi NU (Nahdatul Ulama) pada tahun 1926. Sedangkan ayahnya, Kyai Haji Wahid Hasjim, adalah juga ulama terkenal dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara dan Menteri Agama RI pada tahun 1950-an. Pendidikan yang ditempuh Gus Dur lebih banyak di dunia pesantren. Pernah melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Mesir dan Baghdad, Irak, pada tahun 1960/1970-an, namun tidak selesai.

Terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI bisa dikatakan sebagai *blessing in disguise*. Dalam Pemilihan Umum tahun 1999, sesungguhnya yang keluar sebagai pemenang adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) pimpinan Megawati Soekarno Putri. Namun karena mayoritas umat Islam di Indonesia belum siap menerima Presiden seorang wanita, dalam sidang umum MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) itu Megawati Soekarno Putri dikalahkan secara *votting* oleh Gus Dur.

Selama menjabat sebagai Presiden RI, Gus Dur banyak membuat pernyataan, tindakan, dan kebijakan politik yang kontroversial. Namun kebijakan politik yang berani dan penting dari Gus Dur adalah depolitisasi militer agar tidak terlalu jauh terlibat dalam masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi. Gus Dur juga dianggap sebagai Presiden yang sangat toleran dan menghargai pluralisme masyarakat Indonesia. Bagi umat Islam yang fanatic, radikal, dan berpandangan sempit, maka sikap, ucapan, dan tindakan Gus Dur yang “liberal dan pluralis”, khususnya dalam masalah agama, jelas sangat menjengkelkan. “*Begitu saja, kok repot*” adalah ucapan khas dan sikap Gus Dur yang memandang enteng semua persoalan bangsa Indonesia.

Semuanya itu harus dibayar mahal oleh Gus Dur. Lawan-lawan politiknya banyak yang menuduh bahwa Gus Dur melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita (Aryanti); Gus Dur juga dituduh menyalahgunakan dana bantuan dari Sultan Brunei Darussalam; dan yang lebih penting lagi adalah ketidaksenangan tentara kepada Gus Dur yang berakhir dengan penolakan pihak TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) terhadap kebijakan politik Gus Dur untuk memberlakukan keadaan “darurat militer” di Indonesia. Semua akumulasi ketidakpuasan pada Gus Dur itu mengundang MPR RI untuk melakukan Sidang Istimewa pada tahun 2001. Dalam sidang itu Gus Dur diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden RI, dan digantikan oleh Wakil Presiden RI, Megawati Soekarno Putri.

Kelima, tentang Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Indonesia yang kelima ini dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947 (Mukhlisin & Damarhuda, 1999:226). Ketika menjadi Presiden RI (Republik Indonesia) pada tahun 2001, dengan demikian, usianya 54 tahun. Ketika turun jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2004, Megawati Soekarno Putri berusia 57 tahun.

Pada waktu lahir, ayah Megawati, Soekarno, nampaknya sudah menangkap tanda-tanda alam yang menunjukkan mungkin putrinya itu akan menjadi orang penting juga. Tanda-tanda alam dimaksud adalah adanya angin ribut di luar istana kepresidenan di Yogyakarta ketika putri Soekarno itu lahir. Kemudian ketika ditanyakan kepada Konsul India bahwa “angin ribut” itu dalam bahasa Sansekerta adalah “*mega*”,² maka Soekarno langsung menamai putrinya dengan “*Megawati Setyawati Soekarno Putri*” – suatu penamaan yang sama dengan putra-putrinya yang lain dengan memperhatikan gejala-gejala alam seperti: *Guntur, Sukma, Rahma, dan Guruh*.

²Lihat “Wawancara A.B. Lopian dengan Kosul India, Patnaik, di Yogyakarta tentang Revolusi Indonesia” dalam *Sejarah*, No.1 (Jakarta: MSI-Gramedia, 1992).

Jika dilihat dari latar belakang keluarganya, sebagaimana Gus Dur, Megawati Soekarno Putri jelas termasuk kategori “*trahing kusuma, rembesing madu, lan tedaking andana warih*” atau dari keturunan orang yang baik-baik dan tokoh penting. Betapapun pendidikan dasar dan menengah yang dilaluinya, yakni SR (Sekolah Rakyat), SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah Atas) di Jakarta, serta pernah mengenyam pendidikan tinggi di UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung, dianggap sebagai tidak terlalu istimewa, namun dalam banyak hal Megawati mewarisi kharisma bapaknya. Popularitas dirinya – dari hanya sebagai ibu rumah tangga biasa kemudian menjadi Ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan memenangkan PEMILU (Pemilihan Umum) pada tahun 1999 – jelas karena ia memang putri Presiden RI pertama, Soekarno.

Megawati Soekarno Putri, sama dengan Abdurahman Wahid, adalah pribadi dengan otoritas tradisional, yang dalam banyak hal mewarisi kepemimpinan dari orang tuanya. Namun Megawati berbeda dengan bapaknya, Soekarno. Media massa banyak yang menilai bahwa Megawati adalah pribadi yang pendiam, tenang, dan terkesan tidak memiliki kemampuan yang meyakinkan. Pada waktu kampanye PEMILU 1999, pidato-pidato politiknya, dinilai oleh media massa, tidaklah terlalu istimewa. Bahkan ketika menjadi Presiden RI tahun 2001, visinya sebagai orang penting di Republik ini tidak jelas dan diragukan oleh banyak orang. Sikapnya yang demikian acapkali menjadi bahan ejekan pihak media massa.³

Namun posisi Presiden RI bagi Megawati barangkali adalah sebagai lambang persatuan dan kebanggaan nasional. Para pembantunya yang duduk dalam kabinetlah yang akan melaksanakan dan mensukseskan program-program pembangunan. Dalam konteks ini Megawati cukup berhasil. Ia menjadi kebanggaan karena ialah presiden wanita pertama di Indonesia. Ia juga menjadi lambang kesuksesan karena keberhasilannya dalam mengatasi kemelut intern dalam tubuh partai politik PDIP dan tegar dalam menghadapi tekanan yang sewenang-wenang dari pemerintah Orde Baru pada tahun 1990-an. Megawati juga dinilai berani dan penting dalam tindakan politiknya, terutama dalam mereformasi birokrasi pemerintahan dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) agar lebih efisien, kompetitif, dan menekan perilaku manajemen yang koruptif.

³Media massa atau pers di Indonesia setelah Reformasi memang sangat bebas. Banyak pihak yang menyebutnya sebagai “kebebasan yang *kebablasan*”, yakni kebebasan yang tidak disertai dengan tanggung jawab sosial. Mengkritik, termasuk mendiskreditkan, seseorang dan para pejabat – termasuk Presiden – adalah hal yang biasa bagi pers di Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri pun tidak lepas dari sasaran kritik dan ejekan dari pihak pers dan media massa, baik cetak maupun elektronik, di Indonesia.

Namun pada tahun 2004, dalam PEMILU yang secara langsung memilih Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hasyim Muzadi dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kalla. Bahkan ketika pada tahun 2009, Megawati Soekarno Putri maju lagi dalam pencalonan Presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto, dia juga tetap dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Budiono. Akankah Megawati Soekarno Putri maju kembali dalam pencalonan Presiden RI pada tahun 2014 nanti? Kita sama-sama melihat dan menunggunya.

Keenam, tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Indonesia yang tengah berkuasa ini lahir di Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 9 September 1949. Ketika menjadi Presiden RI tahun 2004, dengan demikian, usia Susilo Bambang Yudhoyono (biasa disingkat dan dipanggil SBY) adalah 55 tahun. Dan ketika turun dari jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2014 nanti, maka usia SBY adalah 65 tahun.

Pendidikan dasar dan menengah SBY dilaluinya di Jawa Timur. Setelah tamat dari SMA (Sekolah Menengah Atas), SBY kemudian masuk lembaga pendidikan AKABRI (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) di Magelang, Jawa Tengah, dan lulus pada tahun 1973 dengan predikat “terbaik”. SBY kemudian bertugas di tentara serta mengikuti kursus dalam pendidikan dan latihan ketentaraan di Indonesia dengan pangkat terakhir adalah Jenderal TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada tahun 2000. Sewaktu bertugas di Amerika Serikat, SBY sebagai tentara juga sempat menyelesaikan pendidikan S2 (Master) di bidang manajemen dari Universitas Webster pada tahun 1991. Dan pendidikan terakhir SBY adalah Doktor di bidang Ekonomi Pertanian yang ia peroleh dari IPB (Institut Pertanian Bogor) pada tahun 2004 (www.presidentri.go.id, 20/5/2012).

SBY barangkali adalah sosok Presiden Indonesia dari keluarga tentara. Tidak hanya bapaknya seorang tentara, SBY juga menikah dengan seorang wanita (Kristiyani Herawati atau dipanggil “Ibu Ani”) anak seorang komandan tentara yang terkenal di Indonesia, Sarwo Edhi Wibowo.⁴ Bahkan salah seorang anak laki-laki SBY juga adalah seorang tentara.

Tentara di Indonesia memang seorang “kesatria” seperti layaknya dalam dunia pewayangan, dimana ia tidak hanya mahir memainkan senjata tetapi dalam banyak hal juga adalah seorang penguasa (Suwirta,

⁴Kolonel Sarwo Edhi Wibowo adalah Komandan RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) pada tahun 1960-an, yang digunakan oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk menumpas sisa-sisa G-30-S/PKI (Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia), terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Mengenai tokoh dan peristiwa ini, lihat Hermawan Sulistyio (1998); dan Robert Cribb (2003).

Kamsori & Sarimaya, 2010). Pandangan, sikap, dan perilaku “bapak tentara Indonesia” sendiri, yakni Jenderal Soedirman pada masa revolusi Indonesia (1945-1950) dan Jenderal Abdul Haris Nasution pada tahun 1950/1960-an, menjadi rujukan bahwa tentara Indonesia memang harus ber-dwifungsi dengan memainkan peranannya sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan kekuatan sosial-politik (Crouch, 1986; dan Sundhaussen, 1987).

Namun, betapapun SBY seorang tentara, tapi dia adalah Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Penampilannya yang berwibawa dan pemikirannya yang rasional serta visioner ke depan, menjadikan SBY berhasil terpilih sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2004 dan 2009. Bagi masyarakat Indonesia, SBY adalah figur Presiden yang telah mampu mengembalikan citra Indonesia di mata negara-negara Asia Tenggara dan masyarakat dunia. Di bawah pemerintahan SBY pula (2004-2014), Indonesia tidak hanya dapat keluar dari krisis ekonomi tetapi juga mampu mencapai stabilitas politik, dinamika demokrasi, dan kemajuan sosial yang relatif baik.

Salah satu agenda utama pemerintahan SBY adalah pemberantasan masalah korupsi, yang sudah membudaya dalam masyarakat Indonesia. Agenda ini tidak mudah dilaksanakan, sebab seperti halnya “*revolusi yang sering memakan anak-anaknya sendiri*”, maka usaha memberantas korupsi di era Reformasi ini juga banyak menimbulkan korban bagi orang-orang yang dinilai dekat dengan SBY. Tercatat, misalnya, besan SBY harus mendekam dalam penjara karena terlibat kasus korupsi; banyak Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota yang dipenjarakan juga karena masalah korupsi; dan sekarang SBY pun tengah didera oleh isu korupsi yang melibatkan elite-elite partai politik yang dibinanya, yakni Partai Demokrat. Apapun tindakan dan kebijakan SBY, termasuk keberhasilan dan kekurangannya sebagai Presiden, akan tetap tercatat dalam sejarah Indonesia modern dan diingat dalam memori kolektif bangsa.

FIGUR PEMIMPIN INDONESIA MASA DEPAN

Dari penjelasan singkat tentang profil keenam Presiden Republik Indonesia itu mungkin menarik untuk dianalisis secara komparatif dari berbagai segi. Dalam hal ini termasuk juga pengaruh *Little Tradition* dan atau *Great Tradition* yang nampak pada keenam Presiden kita. Menurut R. Redfield, yang dimaksud dengan *Little Tradition* adalah tradisi dan kebudayaan lokal, tempat asal individu atau kelompok sosial tumbuh dan berkembang. Sedangkan *Great Tradition* adalah kebudayaan dan peradaban universal, tempat individu atau kelompok sosial mengorientasikan diri dan mencari

rujukan/pembenaran pada dunia luar (Redfield, 1968).

Untuk kasus Indonesia, *Little Tradition* itu bisa berupa budaya lokal Jawa, Sunda, Bugis, dan lain-lainnya. Sedangkan *Great Tradition* bisa berupa kebudayaan dan peradaban Hindu-Buddha, Islam, dan Barat. Perpaduan pengaruh dari dua tradisi itu menarik untuk dianalisis pada enam Presiden kita, di samping juga disinggung secara selintas tentang tipe ideal (*ideal type*) Presiden RI di masa yang akan datang, setelah Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden pada tahun 2014 nanti.

Pertama, dari segi usia. Jika dilihat dari segi usia, Presiden RI berusia rata-rata 52 tahun (Soekarno paling muda, 44 tahun; dan B.J. Habibie paling tua, 62 tahun). Usia seperti itu – dalam perspektif tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia – dinilai sudah matang, dewasa, memiliki visi dan *wisdom* yang bagus. Hanya saja karena masa jabatan Presiden RI bervariasi, dari yang paling lama Soeharto (31 tahun) dan Soekarno (22 tahun) sampai yang paling singkat B.J. Habibie (1 tahun) dan Gus Dur (2 tahun), maka proses jatuhnya Presiden-presiden RI itu masih tidak mulus dan kurang menyenangkan. Dengan adanya Amandemen UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 pada tahun 2001, di mana jabatan Presiden dibatasi 5 tahun dan setelahnya boleh dipilih kembali hanya satu kali, maka diharapkan kisah kepemimpinan Presiden RI akan memiliki *happy ending* yang baik dan mulus.

Kedua, dari segi agama, etnis, dan gender. Keenam Presiden RI jelas beragama Islam, apapun komitmen dan kualitas pribadi ke-Islaman mereka. Hal ini penting sebab mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam. Untuk masa-masa yang akan datang, masalah “Presiden RI beragama Islam” ini nampaknya akan terus dipertahankan, walaupun dalam UUD (Undang-Undang Dasar) 1945 tidak mencantumkan secara eksplisit dan jelas. Sedangkan dari segi etnis, keenam Presiden kita masih didominasi oleh Jawa (5 orang) dan baru 1 orang Presiden Indonesia dari Bugis. Hal ini mungkin karena Jawa merupakan etnis terbesar dalam masyarakat Indonesia.⁵

Namun apapun alasannya, untuk masa yang akan datang, etnis-etnis lain

⁵Dari 5 orang Presiden Indonesia dari Jawa itu perlu dipetakan lebih lanjut berdasarkan tempat kelahirannya, yakni 3 orang Presiden dari Jawa Timur (Soekarno, Abdurrahman Wahid, dan Susilo Bambang Yudhoyono) serta 2 orang Presiden dari Yogyakarta (Soeharto dan Megawati Soekarno Putri). Adalah menarik untuk dicatat bahwa orang Sunda, yang merupakan etnis terbesar kedua setelah Jawa, belum pernah ada yang menjadi Presiden Indonesia. Ini perlu dikaji lebih lanjut dan dianalisis sebab-sebabnya dari berbagai perspektif.

mesti diberi kesempatan untuk memimpin negeri ini, sehingga tidak ada lagi pernyataan ketidakpuasan tentang “dominasi dan penjajahan Jawa” seperti yang nampak pada kasus Aceh dan Papua akhir-akhir ini misalnya. Memang, sebagaimana dinyatakan oleh Benedict R.O’G. Anderson, bahwa *nation-state* Indonesia ini disepakati sebagai “proyek bersama” yang akan memberikan kesempatan dan kedudukan yang sama di antara warga negaranya dalam mencapai cita-cita kemajuan, kesejahteraan, martabat, harga diri, dan kemerdekaan bangsa (Anderson, 1993).

Sementara itu mengenai gender, sebagaimana telah dikemukakan di muka, bahwa Megawati Soekarno Putri adalah Presiden wanita pertama di Indonesia. Ke depan mungkin perlu dipikirkan tentang potensi, peluang, kesempatan, dan kompetensi seorang wanita untuk menjadi pemimpin nomor satu di negeri ini. Hal ini karena para futurolog melihat kecenderungan ke depan bahwa kaum wanita akan menempati posisi yang semakin dominan (Naisbitt & Aburdene, 1990).

Ketiga, dilihat dari segi pendidikan dan orientasi pemikiran. Keenam Presiden kita memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup baik, yakni rata-rata lulusan pendidikan menengah atas (paling tinggi adalah B.J. Habibie, yang Dr. Ir.; dan Susilo Bambang Yudhoyono, yang Dr.; serta paling rendah adalah Soeharto, yang tamatan sekolah menengah ekonomi). Tingkat pendidikan ini penting karena turut mempengaruhi corak pemikiran, kecakapan, tindakan, visi dan kebijakan, serta relasi sosial seorang Presiden RI dalam memimpin bangsa ini di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional.

Mengenai orientasi pemikiran, mungkin karena terpengaruh oleh pendidikan formal dan hegemoni budaya, maka keenam Presiden RI berpikiran modern (baca: Barat). Hal ini juga tetap baik, sepanjang ia tidak didikte oleh kepentingan politik Barat dan larut dalam kebudayaan Barat yang tidak seluruhnya cocok dengan kebudayaan Indonesia. Sebagaimana dicontohkan oleh sejarah masa lalu kita, sebaiknya Presiden-presiden RI di masa mendatang menjadi jenius-jenius lokal (*local genius*) yang mampu mengapresiasi dan mengkreasi unsur-unsur dalam *little tradition* dengan *great tradition* sehingga menjadi entitas kebudayaan dan masyarakat yang lebih maju, beradab, dan modern.

Dan **keempat, terakhir, dilihat dari segi profesi: sipil atau militer.** Dari keenam Presiden RI, empat orang adalah sipil (Soekarno, B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati) dan dua orang militer (Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono). Walaupun begitu, masalah hubungan “sipil-militer” ini dalam sejarah Indonesia modern cukup rumit dan dilematis. Dalam tradisi masyarakat Barat yang maju, modern, dan demokratis, dominasi

kepemimpinan sipil atas militer itu merupakan realitas sosial yang tak terbantahkan.

Namun dalam konteks masyarakat Indonesia modern, sebagaimana telah disinggung dimuka, bahwa pihak militer yang mengindetifikasikan dirinya sebagai “ksatria” – yang dalam dunia pewayangan tidak hanya mahir dalam memainkan senjata, tetapi juga seorang penguasa – ditambah lagi karena masalah kepemimpinan sipil dan kelas menengah yang belum mantap, maka konsep dwi fungsi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sebagai kenyataan yang akan terus dipertahankan (Britton, 1996:11-36).

PENUTUP

Ke depan barangkali perlu didudukkan pada porsinya masing-masing, bahwa masyarakat Indonesia modern itu akan merupakan entitas sosial di mana diferensiasi, spesialisasi, dan profesionalisasi merupakan arah dan gejala sosial yang dominan. Dengan demikian, tidak bisa lagi seorang militer merasa mampu mengatasi semua problematika sosial yang ada di Indonesia. Masyarakat madani (*civil society*) yang ditandai oleh keterbukaan, profesionalisme, kemajuan, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan pluralisme nampaknya harus menjadi agenda utama bangsa Indonesia ke depan. Dominasi militer yang cenderung represif dan otoritarian harus diminimalisir agar proses pembangunan karakter bangsa benar-benar berjalan secara demokratis dan egalitarian.

Kisah seorang militer yang menjadi guru sejarah di Timor Timur, Aceh, dan Papua – entah cerita ini benar atau tidak – cukuplah menjadi contoh, betapa peristiwa yang sepele dan sederhana itu ternyata memiliki makna sosial yang mendalam. Dikisahkan bahwa pada tahun 1970-an hingga 1980-an, ketika guru sejarah yang juga seorang militer itu bertanya dengan suara yang galak dan tegas kepada salah seorang siswanya tentang “*Siapa yang berani menurunkan bendera warna merah-putih-biru di Surabaya pada tahun 1945 itu?*”; yang ternyata segera dijawab oleh siswa itu dengan kata-kata sebagai berikut: “*Ampun pak, saya tidak tahu, jangan tangkap saya pak, karena saya bukan anggota GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan)*”. Dengan begini maka mengerjakan sesuatu yang nampaknya mudah ternyata sulit juga, jika tidak ditangani oleh mereka yang ahli pada bidangnya.

Dari penjelasan tentang profil dan karakter keenam Presiden Republik Indonesia di atas, maka tipe ideal (*ideal type*) bagi Presiden RI di masa yang akan datang adalah: “*seseorang yang karena asal-usulnya yang baik, berpendidikan, beragama Islam, dari etnis apapun asal memiliki integritas*”

pribadi yang baik, berpikiran maju dan modern, punya komitmen pada kehidupan demokrasi, memiliki visi dan policy yang jelas, serta otoritasnya mampu mengintegrasikan dan mensinergikan seluruh potensi bangsa untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia”. Tapi bagaimana dengan Presiden Indonesia di masa yang akan datang?

Gambaran tentang sosok Presiden RI di masa depan, paling tidak menurut persepsi dan penafsiran kami sendiri setelah melihat sejarah perjalanan orang-orang penting yang pernah memimpin negeri ini, adalah sangat krusial untuk dikaji dan diperdebatkan agar bangsa ini tidak kehilangan arah dan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Dan kaitannya dengan pembangunan karakter bangsa, tentu saja sangat relevan karena pemimpin, terutama Presiden Indonesia, adalah figur panutan dan contoh teladan bagi rakyat Indonesia yang berjumlah lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2015 nanti. Krisis kepemimpinan dan tiadanya keteladanan dari seorang pemimpin, dalam corak masyarakat Indonesia yang masih paternalistik, jelas akan mengakibatkan juga proses reduksi terhadap karakter bangsa secara keseluruhan. Bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak memiliki memori kolektif bangsa dalam sejarahnya; dan itu termasuk bangsa yang *sableng* alias gila, karena hanya orang seperti ini saja yang hilang ingatan, termasuk melupakan sejarahnya.

Bibliografi

- Adams, Cindy. (1965). *Sukarno: An Autobiography as Told to Ciny Adams*. New York: The Bobs-Merrill Company Inc.
- Anderson, Benedict R.O’G. & Ruth T. McVey. (1971). *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965: Coup in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University.
- Anderson, Benedict R.O’G. (1980). *Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Anderson, Benedict R.O’G. (1993). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Arikel “Biografi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono” dalam www.presidentri.go.id [diakses di Bandung, Indonesia: 20 Mei 2012].
- Baehaqi, Imam [ed]. (1998). *Soeharto Lengser: Perspektif Luar Negeri*. Yogyakarta: Penerbit LKiS, Terjemahan.
- Barton, Greg. (1999). *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta:

- Paramadina dan Pustaka Antara, Terjemahan.
- Benda, Harry J. (1982). "Democracy in Indonesia" dalam Benedict Anderson & Audrey Kahin [ed]. *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Bresnan, John. (1993). *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*. New York: Columbia University Press.
- Britton, Peter. (1996). *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Cahyono, Heru. (1998). *Soemitro: Dari Pangkoptamtib hingga Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cribb, Robert. (2003). *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali*. Yogyakarta, Indonesia: Mata Bangsa, Terjemahan.
- Crouch, Harold. (1986). *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, Terjemahan.
- Feith, Herbert. (1982). "History, Theory, and Indonesian Politics: A Reply to Harry J. Benda" dalam Benedict Anderson & Audrey Kahin [ed]. *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Fukuyama, Francis. (2001). *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, Terjemahan.
- Godechot, Jacques. (1989). *Revolusi di Dunia Barat (1770-1799)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Terjemahan.
- Hidayat, Bambang. (2003). "Karakter Tak Terlupakan: Soekarno Pemimpi, Penggagas, dan Pelaksana" dalam *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. IV(7). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Koentjaraningrat [ed]. (1984). *Masalah-masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, 1500-1900: Dari Emporium Sampai Imperium, Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia.
- King, Dwight Y. (1982). "Indonesia's New Orde as a Bureaucratic Polity. A Neopatriomonal Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does It Make?" dalam Benedict Anderson & Audrey Kahin [ed]. *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Legge, John D. (1985). *Sukarno: A Political Biography*. Sydney: Allen & Unwin, second edition.
- Lombard, Denys. (1996). *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan, Jilid 1*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan.
- Mackie, Jamie. (1982). "Indonesia Since 1945: Problems of Interpretation" dalam Benedict Anderson & Audrey Kahin [ed]. *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca, New York: Cornell Modern Indonesia Project.
- Mihardja, Achdiat K. [ed]. (1977). *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Mukhlisin & Damarhuda. (1999). *Ratu Adil dan Perjalanan Spiritual Megawati*. Bali: Yayasan Purbakala.
- Naisbitt, John & Patricia Aburdene. (1990). *Megatrends 2000*. New York: William Morrow and Co. In.
- Nuryanti, Reni et al. (2007). *Istri-istri Sukarno*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Nurzaman, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2012). "From Bullet to the Ballot: A Case

- Study of the East Timor's Referendum as Viewed by Newspapers of *Kompas* and *Republika* in Jakarta" in *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, Vol.4(1) October forthcoming issue.
- Redfield, R. (1968). *The Peasant Society and Culture*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ricklefs, M.C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Hampshire: Palgrave, Third Edition.
- Roeder, O.G. & Mahiddin Mahmud. (1980). *Who's Who in Indonesia*. Singapore: Gunung Agung, second edition.
- Roeder, O.G. (1985). *Anak Desa: Biografi Presiden Soeharto*. Jakarta: Gunung Agung, cetakan kelima.
- Rohaedi, Ayat. (1984). "Local Genius dan Perkembangan Kebudayaan" dalam Edi S. Ekadjadi [ed]. *Manusia dan Kebudayaan Sunda*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sargent, Lyman Tower. (1986). *Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta: PT Bina Aksara, Terjemahan.
- Schapiro, J. Salwyn. (1958). *Liberalism: Its Meaning and History*. Princeton and New York: D.van Nostrand Company Inc.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soeharto. (1989). *Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya: Otobiografi seperti Dipaparkan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H.* Jakarta: PT Citra Lamtorogung Persada.
- Sulistyo, Hermawan. (1998). *Palu-Arit di Ladang Tebu*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sundhaussen, Ulfh. (1987). *Politik Militer Indonesia: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: Penerbit LP3ES, Terjemahan.
- Suwirta, Andi. (1989). "Joke Politik para Pemimpin Dunia Tahun 1980-an" dalam *Catatan Harian Tidak Diterbitkan*. Bandung: t.p.
- Suwirta, Andi. (2003). "Imageri Indiahe: Cita-Ideal Nasionalisme Indonesia yang Dibayangkan?" *Makalah* disajikan dalam Forum Diskusi MATAKU (Masyarakat Pencinta Buku) di IKA UPI Bandung: 12 Februari.
- Suwirta, Andi. (2012). "Cecep Darmawan: Sang Plagiator?" dalam media online *ASPENSI in News & Views*. Tersedia juga di: www.aspensi.com [diakses di Bandung, 2 Mei 2012].
- Suwirta, Andi, Moch Eryk Kamsori & Farida Sarimaya. (2010). "Sejarah Orde Baru dan Reformasi di Indonesia, 1966-1998". *Buku Teks Perkuliahan Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah UPI [Universitas Pendidikan Indonesia].
- Titania. (1978). *Sawito: Siapa, Mengapa & Bagaimana*. Solo: Badan Penerbit Sasongko.
- "Wawancara A.B. Lopian dengan Kosul India, Patnaik, di Yogyakarta tentang Revolusi Indonesia" dalam *Sejarah*, No. 1. Jakarta: MSI-Gramedia, 1992.
- Winters, Jeffrey A. (1999). *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Terjemahan.